

Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) 2025

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi
Tengah**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Palu, 18 Pebruari 2026
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.1 Penerimaan Pajak	
B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Palu, 18 Pebruari 2026

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng

Rakhmat Renaldy

NIP. 197310101996031001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.749.810 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp24.749.810 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.715.464.815 atau mencapai 68,05 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp18.685.070.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.439.611.304 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp78.917.476; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp15.351.948.178 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp8.745.650.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.096.711 dan Rp15.429.514.593

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.406.418 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp14.238.880.822 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-14.213.474.404, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.368.500 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-14.212.105.904.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-14.212.105.904 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 29.641.620.497 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp15.429.514.593

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	24.749.810	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	24.749.810	-	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	7.403.842.000	7.341.657.055	99,16	-
Belanja Barang	B.2.2	6.988.471.000	5.373.807.760	76,90	-
Belanja Modal	B.2.3	4.292.757.000	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		18.685.070.000	12.715.464.815	68,05	-



Palu, 18 Pebruari 2026
 Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng

(Handwritten Signature)
 Rakhmat Kenaldy
 NIP. 197310101996031001

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	2.025.108	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	(10.124)	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.14	-	-
Persediaan	C.15	76.902.492	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		78.917.476	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
Jumlah Properti Investasi		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	4.756.369.000	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	10.491.258.829	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	13.372.334.090	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	87.970.098	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(13.355.983.839)	-
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		15.351.948.178	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	1.436.125.117	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(1.427.379.467)	-
Jumlah Aset Lainnya		8.745.650	-
JUMLAH ASET		15.439.611.304	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	10.096.711	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-

Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.096.711	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		10.096.711	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	15.429.514.593	-
JUMLAH EKUITAS		15.429.514.593	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.439.611.304	-

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	25.406.418	-
Jumlah Pendapatan		25.406.418	-
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	7.325.582.055	-
Beban Persediaan	D.4	105.345.350	-
Beban Barang dan Jasa	D.5	3.568.185.837	-
Beban Pemeliharaan	D.6	1.204.901.002	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	467.508.772	-
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	1.567.347.682	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	10.124	-
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	D.12	-	-
Jumlah Beban		14.238.880.822	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(14.213.474.404)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	1.368.500	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1.368.500	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(14.212.105.904)	-
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(14.212.105.904)	-



Pau, 18 Pebruari 2026
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(14.212.105.904)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	29.641.620.497	-
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		15.429.514.593	-
EKUITAS AKHIR	E.6	15.429.514.593	-



Palu, 18 Pebruari 2026
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng

(Signature)
Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kementerian Hukum beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-2024), dan "Kementerian Hukum" (2024-sekarang).

Kementerian Hukum pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan ,menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dan sekarang menjadi Kementerian Hukum.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat).

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum berkomitmen dengan visi "masyarakat memperoleh kepastian hukum".

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia yang Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	8.704.116.000	7.403.842.000
Belanja Barang	6.824.791.000	6.988.471.000
Belanja Modal	4.292.757.000	4.292.757.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	19.821.664.000	18.685.070.000

Realisasi Pendapatan
Rp24.749.810

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.749.810 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp24.749.810. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tidak ada kenaikan atau penurunan. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	24.749.810	-
Jumlah	-	24.749.810	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	24.749.810	-	-
Jumlah	24.749.810	-	-

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 Tidak terdapat Pendapatan Pajak.. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.2 Belanja

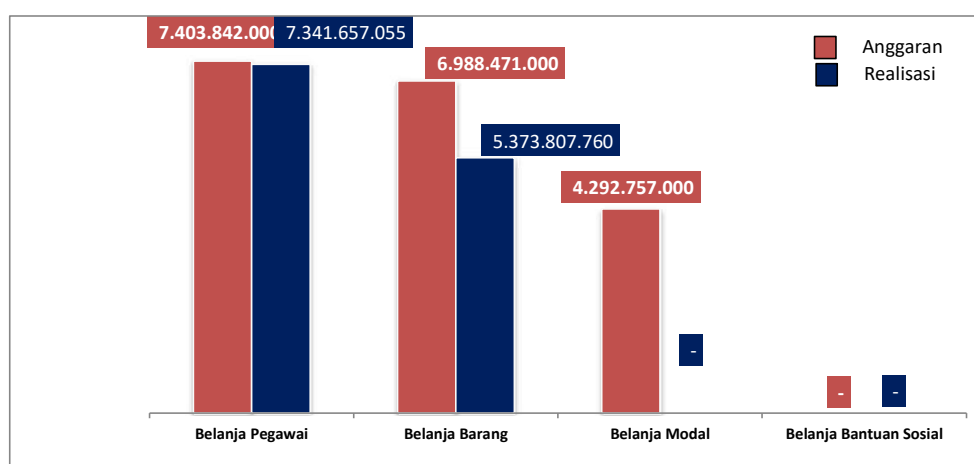
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp12.715.464.815 atau 68,05 % dari anggaran belanja sebesar Rp.18.685.070.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	7.403.842.000	7.341.657.055	99,16
Belanja Barang	6.988.471.000	5.373.807.760	76,90
Belanja Modal	4.292.757.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	18.685.070.000	12.715.464.815	68,05

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% tidak ada kenaikan atau penurunan.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	7.341.657.055	-	-
Belanja Barang	5.373.807.760	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	12.715.464.815	-	-

Belanja Pemeliharaan	1.192.325.430	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	467.508.772	-	-
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5.373.807.760	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	5.373.807.760	-	-

Realisasi Belanja Modal
Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh tidak ada kenaikan atau penurunan..

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh tidak ada kenaikan atau penurunan..

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak ada kenaikan atau penurunan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari tidak ada kenaikan atau penurunan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak ada kenaikan atau penurunan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak ada kenaikan atau penurunan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial tidak ada kenaikan atau penurunan..

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Piutang Bukan Pajak
Rp2.025.108

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.025.108 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.025.108	-
Jumlah	2.014.984	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp10.124

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.124 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan
(Unaudited) TA 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp76.902.492

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp76.902.492 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	72.499.114	-
Bahan untuk Pemeliharaan	4.403.378	-
Jumlah	76.902.492	-

Persediaan tersebut di atas dalam barang persediaan dalam kondisi baik.

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.756.369.000 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut tidak ada kenaikan.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp13.372.334.090

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.372.334.090 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4.250.094.289)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	(4.250.094.289)

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -
- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -
- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.87.970.098 dan Rp.0. Aset tetap tersebut. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi tambah/kurang:

0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp13.355.983.839 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10.491.258.829	(9.105.889.550)	1.385.369.279
2	Gedung dan Bangunan	13.372.334.090	(4.250.094.289)	9.122.239.801
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	87.970.098	-	87.970.098
Akumulasi Penyusutan		23.951.563.017	(13.355.983.839)	10.595.579.178

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a.	-
b.	-
c.	-
d.	-
e.	-

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan Rp0

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Rp0

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana Lainnya	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.436.125.117 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(1.427.379.467)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	(1.427.379.467)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 1.427.379.467

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.427.379.467 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	1.436.125.117	(1.427.379.467)	8.745.650
-	-	-	-
Total	1.436.125.117	(1.427.379.467)	8.745.650

Utang kepada Pihak Ketiga Rp10.096.711

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.096.711 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	10.096.711	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-
	-	-
	-	-
Total	10.096.711	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Belanja Langganan Daya dan Jasa bulan Desember 2025 yang dibayarkan bulan Januari 2026

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-

Total	-	-
--------------	---	---

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

9afhasgdfgsdaifsgdhaf

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0*

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang Persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran.

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

-

Kewajiban Konsesi Jasa
Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

tentang konsesii jasa

Ekuitas
Rp15.429.514.593

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.429.514.593. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 54 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp25.406.418

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp25.406.418 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh dari sewa rumah dinas pegawai.. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	25.406.418,00	-	-

Beban Pegawai
Rp7.325.582.055

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.325.582.055 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh tidak ada kenaikan/ penurunan.. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Beban Tunj. Struktural PNS	214.535.000	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	304.151.000	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	40.369.890	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	7.325.582.055	-	-

Beban Persediaan
Rp105.345.350

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp105.345.350 dan Rp0

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh tidak ada kenaikan/ penurunan.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	105.345.350	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	105.345.350,00	-	-

Beban Barang dan Jasa
Rp3.568.185.837

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.568.185.837 dan Rp0.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh tidak terdapat kenaikan/ penurunan.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.875.314.803	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.107.000	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	127.020.000	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	47.279.000	-	-
Beban Bahan	119.075.500	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	5.200.000	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.200.000	-	-
Beban Langganan Listrik	276.453.382	-	-
Beban Langganan Telepon	17.036.152	-	-
Jumlah	3.568.185.837	-	-

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.204.901.002 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh tidak ada kenaikan/ penurunan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	670.930.500	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	521.394.930	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	12.575.572	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1.204.901.002	-	-

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp467.508.772 dan Rp0

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen disebabkan oleh tidak ada kenaikan/ penurunan.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	452.508.772	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	467.508.772,00	-	-

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.567.347.682

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.567.347.682 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	892.090.028	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	666.512.004	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digu	8.745.650	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	1.567.347.682	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.567.347.682	-	-

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp10.124

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.124 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	10.124	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	10.124,00	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp1.368.500

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.368.500 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.368.500	-	-
	-	-	-
Jumlah	1.368.500,00	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNBPN	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Defisit LO

Rp.14.212.105.904,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.14.212.105.904,00 dan Rp.0,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp29.641.620.497

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.29.641.620.497 dan Rp.0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.715.464.815
Diterima dari Entitas Lain	(24.749.810)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	16.950.905.492
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	29.641.620.497

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 12.715.464.815, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 24.749.810

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp16.950.905.492 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp15.429.514.593*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.15.429.514.593,00 dan Rp.0,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I	Lampiran LK Unaudited 2025
LAMPIRAN	II	Surat Hasil Rekonsiliasi SAKTI-SPAN periode bulan Desember 2025
LAMPIRAN	III	Laporan Keuangan MonSAKTI Unaudited 2025
LAMPIRAN	IV	Telaah Laporan Keuangan Unaudited 2025
LAMPIRAN	V	Memo Jurnal periode bulan Desember 2025
LAMPIRAN	VI	LPJ Bendahara Pengeluaran dan Rekening Koran bulan Desember 2025

Penjelasan atas to do list Lainnya
Pengungkapan Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode Persediaan

No	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D

Penjelasan atas masih adanya to do list di monsakti:

1. Tidak terdapat to do list.

Penjelasan atas to do list Lainnya
Pengungkapan Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN

No	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D

Penjelasan atas masih adanya to do list di monsakti:

1. Tidak terdapat to do list.

INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Satuan Kerja : (692028) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum
 Program : (WA) Program Dukungan dan Manajemen
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum								
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.511.997.000	12.490.661.963	92,44%	8	8	Laporan	100%	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal Tahun 2025 dengan realisasi PCRO 100% dan RVRO sebanyak 8 Laporan
	Sub Total	13.511.997.000	12.490.661.963	92,44%	8	8	Laporan	100%	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	Total	13.511.997.000	12.490.661.963	92,44%					

*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Satuan Kerja : (692028) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum
 Program : (WA) Program Dukungan dan Manajemen
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum								
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.292.757.000	-	0,00%	188	188	Unit	100%	Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Tahun 2025 dengan realisasi PCRO 100% dan RVRO sebanyak 188 Unit
	Sub Total	4.292.757.000	-	0,00%	188	188	Unit	100%	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian								
	Total	4.292.757.000	-	0,00%					

*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Satuan Kerja : (692028) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum
 Program : (WA) Program Dukungan dan Manajemen
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum								
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal								
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	237.122.000	100.577.321	42,42%	66	66	Orang	100%	Terlaksananya Manajemen SDM Internal Tahun 2025 dengan realisasi PCRO 100% dan RVRO sebanyak 66 Orang
	Sub Total	237.122.000	100.577.321	42,42%	66	66	Orang	100%	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	Total	237.122.000	100.577.321	42,42%					

*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

INFORMASI KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kementerian/Lembaga : (135) Kementerian Hukum Republik Indonesia
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Satuan Kerja : (692028) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
 Fungsi : (03) Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : (03) Pembinaan Hukum
 Program : (WA) Program Dukungan dan Manajemen
 Lokasi : (18.51) Kota Palu

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum								
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	643.194.000	130.667.363	20,32%	15	15	Laporan	100%	Terlaksananya Layanan Manajemen Kinerja Internal Tahun 2025 dengan realisasi PCRO 100% dan RVRO sebanyak 15 Laporan
	Sub Total	643.194.000	130.667.363	20,32%	15	15	Laporan	100%	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian)								
	Total	643.194.000	130.667.363	20,32%					

*) Keterangan : Penyesuaian dijelaskan secara memadai di dalam Laporan Keuangan

Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada **Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Satker 692028** tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 01 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di dengan pagu mencapai **Rp0** dan realisasi sebesar **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di dengan pagu mencapai **Rp0** dan realisasi sebesar **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

6. Prioritas Nasional 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di dengan pagu mencapai **Rp.0** dan realisasi sebesar **Rp.0** dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

7. Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di dengan pagu mencapai **Rp0** dan realisasi sebesar **Rp0** dengan rincian sebagai berikut

Kementerian/Lembaga:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
-	-	-	-	-	-	-	-

8. Prioritas Nasional 08 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di dengan pagu mencapai **Rp0** dan realisasi sebesar **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KPPN PALU

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 692028 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 22/01/26 6:43

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	18,685,070,000	18,685,070,000	0
2	Belanja	12,721,906,647	12,721,906,647	0
3	Pengembalian Belanja	-6,441,832	-6,441,832	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	24,749,810	24,749,810	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

DATA SETORAN/BELANJA BELUM MASUK KE SIAP

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM 135
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH 692028

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 7:52 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	18,685,070,000	12,715,464,815	(5,969,605,185)	68.05	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

PALU, 18 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RAKHMAT RENALDY, SH. MH
NIP. 197310101996031001



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (692028) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 7:52 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc


NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	2,025,108	0	2,025,108	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(10,124)	0	(10,124)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,014,984	0	2,014,984	0.00
Persediaan	76,902,492	0	76,902,492	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	78,917,476	0	78,917,476	
ASET TETAP				
Tanah	4,756,369,000	0	4,756,369,000	0.00
Peralatan dan Mesin	10,491,258,829	0	10,491,258,829	0.00
Gedung dan Bangunan	13,372,334,090	0	13,372,334,090	0.00
Aset Tetap Lainnya	87,970,098	0	87,970,098	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(13,355,983,839)	0	(13,355,983,839)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	15,351,948,178	0	15,351,948,178	
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	1,436,125,117	0	1,436,125,117	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,427,379,467)	0	(1,427,379,467)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	8,745,650	0	8,745,650	
JUMLAH ASET	15,439,611,304	0	15,439,611,304	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,096,711	0	10,096,711	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,096,711	0	10,096,711	
JUMLAH KEWAJIBAN	10,096,711	0	10,096,711	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	15,429,514,593	0	15,429,514,593	0.00
JUMLAH EKUITAS	15,429,514,593	0	15,429,514,593	
JUMLAH EKUITAS	15,429,514,593	0	15,429,514,593	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15,439,611,304	0	15,439,611,304	

Keterangan :

FINAL

PALU, 18 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RAKHMAT RENALDY, SH. MH
NIP. 197310101996031001



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (692028) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI
TENGAH

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 7:52 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	25,406,418	0	25,406,418	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	25,406,418	0	25,406,418	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	25,406,418	0	25,406,418	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,325,582,055	0	7,325,582,055	
Beban Persediaan	105,345,350	0	105,345,350	
Beban Barang dan Jasa	3,568,185,837	0	3,568,185,837	
Beban Pemeliharaan	1,204,901,002	0	1,204,901,002	
Beban Perjalanan Dinas	467,508,772	0	467,508,772	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (692028) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI
TENGAH

Tgl Data : 18/02/26 1:56 AM

Tgl Cetak : 18/02/26 7:52 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,567,347,682	0	1,567,347,682	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	10,124	0	10,124	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	14,238,880,822	0	14,238,880,822	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(14,213,474,404)	0	(14,213,474,404)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,368,500	0	1,368,500	
Pendapatan Pelepasan Aset	1,368,500	0	1,368,500	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,368,500	0	1,368,500	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14,212,105,904)	0	(14,212,105,904)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(14,212,105,904)	0	(14,212,105,904)	()

Keterangan :

FINAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (692028) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI
TENGAH

Tgl Data : 18/02/26 12:43 AM
Tgl Cetak : 18/02/26 7:52 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14,212,105,904)	0	(14,212,105,904)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	29,641,620,497	0	29,641,620,497	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	15,429,514,593	0	15,429,514,593	0
EKUITAS AKHIR	15,429,514,593	0	15,429,514,593	0

Keterangan :
FINAL



PALU, 18 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RAKHMAT RENALDY, SH. MH
NIP. 197310101996031001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TA 2025 (Unaudited)**

Kode dan Nama UAKPA : (692028) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

Kode dan Nama UAPPAW : (1800) SULAWESI TENGAH

Kode dan Nama Eselon 1 : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Kode dan Nama K/L : (135) KEMENTERIAN HUKUM RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	N/A	N/A	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

		Ada	Tidak	Seharusnya
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)				
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal				
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
Daftar MONSAKTI				
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan				
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)				
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	N/A	N/A	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	N/A	N/A	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	N/A	N/A	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	N/A	N/A	Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada				
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak

6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"	N/A	N/A	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)	N/A	N/A	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)	N/A	N/A	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)	N/A	N/A	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A	N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	N/A	N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A	N/A	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	N/A	N/A	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	N/A	N/A	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A	N/A	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak

		Ya	Tidak	Seharusnya
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)			
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas ?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	N/A	N/A	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2025 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	N/A	N/A	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	N/A	N/A	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan	N/A	N/A	Ya

2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk


Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Rakhmat Kenaldy
NIP. 198612272009122004



Palu, 23 Januari 2026
Penelaah,



Wiyanto
NIP. 198602172009011004

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **(135) KEMENTERIAN HUKUM RI**
 Eselon I : **(01) SEKRETARIAT JENDERAL**
 Wilayah : **(1800) SULAWESI TENGAH**
 Satuan Kerja : **(692028) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**
 No. Dokumen : **001**
 Tanggal : **31 DESEMBER 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Penyesuaian Semester II Tahun 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran <input type="checkbox"/> Persediaan <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	<input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek <input type="checkbox"/> Transfer Masuk <input type="checkbox"/> Transfer Keluar <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset <input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU <input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja <input type="checkbox"/> Perolehan Aset <input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang <input type="checkbox"/> Hibah Langsung <input type="checkbox"/>
---	---

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	Kode Akun	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	10.096.711	
	K	522111	Belanja Langganan Listrik		10.096.711

Uraian :
Jurnal atas Utang Belanja Langganan Listrik

Dibuat oleh :
 Petugas Akuntansi



Dyah Ayu Puspitasari
 Tanggal : 31 Desember 2025



Disetujui oleh :
 KPA



Rakhat Renaldy
 Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam oleh :
 Operator GLP



Wiyanto
 Tanggal : 31 Desember 2025



PT PLN (PERSERO)
UIW SULUTTENGGGO

Nomor : AGA/PUSAT/2026/692028
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Segera
Perihal : Tagihan Listrik Satker KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

06 Januari 2026


Kepada Yth :
Kepala
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM SULAWESI TENGAH
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan tagihan listrik KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH Januari 2026 sebesar **Rp 10,096,711** (*Sepuluh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sebelas rupiah*) sesuai dengan daftar terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan juga hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik tersebut, paling lambat tanggal 19 bulan berjalan.
2. Apabila sampai dengan batas waktu di atas belum dilunasi, maka akan dilakukan pemutusan aliran listrik.
3. Pembayaran tagihan dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai berikut :

Bank : BANK DKI
Nomor Virtual Account : 9901235400000000
Nama Pemilik Rekening : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI
Nomor NPWP : 01.001.629.3.051.000
Alamat : Jalan Trunojoyo Blok M1/135 Melawai, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SENIOR MANAGER NIAGA DAN MANAJEMEN
PELANGGAN
PLN MAMAN SULAEMAN

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN PELANGGAN SATKER PER BULAN


LAMPIRAN SURAT
NOMOR : AGA/PUSAT/2026/692028
TANGGAL : 06 Januari 2026

SATKER : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
KODE SATKER : 692028
NO TAGIHAN : AGA.04/UP3.PLU/2026/692028
BULAN INVOICE : Januari 2026

NO	NAMA PELANGGAN	IDPEL	BULAN TAGIHAN	TARIF	DAYA	PEMAKAIAN KWH				BIAYA BEBAN	BIAYA PEMAKAIAN	PPN	LAIN LAIN	JML TAGIHAN SEBELUM METERAI	MAT	JML TAGIHAN SETELAH METERAI
						ST.AWAL	ST.AKHIR	F.KALI	KWH							
1	KANTOR KEHAKIMAN	312100090026	202601	P1	82,500	3,211.13	3,408.96	30	5,935	0	10,086,711	0	0	10,086,711	10,000	10,096,711
		JUMLAH							5,935	0	10,086,711	0	0	10,086,711	10,000	10,096,711

Terbilang Sepuluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah

PT PLN (PERSERO)

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SENIOR MANAGER NIAGA DAN
MANAJEMEN PELANGGAN
PLN MAMAN SULAEMAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-135.01.2.692028/2025

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (18.51) SULAWESI TENGAH / KOTA PALU

KPPN : (051) Palu

Satuan Kerja : (692028) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

Alamat dan No Telp : JL. DEWI SARTIKA NO. 23 , 0451481205

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00037/DRPP/692028/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	9.404.400,00	1.922.906.028,00	1.932.310.428,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	9.404.400,00	1.922.906.028,00	1.932.310.428,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	9.404.400,00	995.493.428,00	1.004.897.828,00	0,00
	1. BP UP*)	9.404.400,00	0,00	9.404.400,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	927.412.600,00	927.412.600,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	68.080.828,00	68.080.828,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00 karena Tidak terdapat selisih
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00 karena Tidak terdapat selisih
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00 karena Tidak terdapat selisih
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00 karena Tidak terdapat selisih

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



RAKHMAT RENALDY, SH. MH
NIP. 197310101996031001

KOTA PALU, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



WIYANTO

NIP. 198602172009011004

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2025-12

Kode Satker : 692028

Kode KPPN : 051

Nama Satker : KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
PALU

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	Tanggal 08 senilai Rp 250,454,601, Tanggal 09 senilai Rp 288,697,951, Tanggal 15 senilai Rp 202,084,923, Tanggal 19 senilai Rp 56,991,113
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.0.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 654926920281000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00037/DRPP/692028/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00 karena Tidak terdapat selisih

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00 karena Tidak terdapat selisih

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00 karena Tidak terdapat selisih

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00 karena Tidak terdapat selisih

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



WIYANTO
NIP. 198602172009011004

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



RAKHMAT RENALDY, SH. MH
NIP. 197310101996031001

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026


***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 692028

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65492692028100 0	BPG 051 KANWIL KEMENKUM SULTENG	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	20	S- 190/KPN.1205/202 5	30-01-2025	2025-12-31	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



WYANTO
NIP. 198602172009011004

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

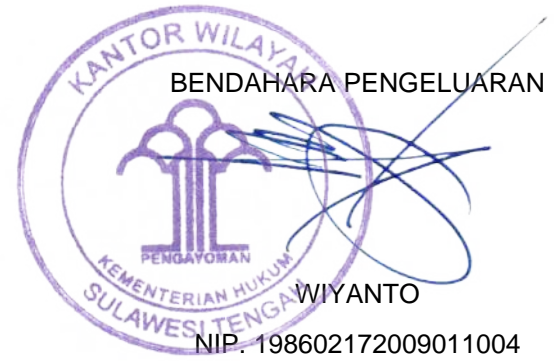
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2025

Kementerian / Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (18.51) SULAWESI TENGAH / KOTA PALU
 Satuan Kerja : (692028) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH69202800-
 No Rekening : 654926920281000
 Nama Rekening : BPG 051 KANWIL KEMENKUM SULTENG
 Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2025			0,00
05-12-2025	FPK-PENG-cSC4wmdQr9Nltbi	Terima dari SPM TUP No.00246A Tgl 5/12/2025	927.412.600,00	0,00	927.412.600,00
08-12-2025	FPK-PENG-Qi9iiWpN8wF99wb	[DARI TUNAI] Tarik Tunai TUP	0,00	250.000.000,00	677.412.600,00
09-12-2025	FPK-PENG-qsifYi9UwKujrcu	[DARI TUNAI] Tarik Tunai TUP	0,00	100.000.000,00	577.412.600,00
10-12-2025	FPK-PENG-LGQ0lOxkN5ems56	[DARI TUNAI] Tarik Tunai TUP	0,00	273.856.000,00	303.556.600,00
12-12-2025	FPK-PENG-t8onQPwl8zlvayK	SPM GUP Nihil Nomor : 00251A tanggal 11/12/2025	0,00	0,00	303.556.600,00
15-12-2025	FPK-PENG-2rGTNAjgVKmfSLu	[DARI TUNAI] Tarik Tunai TUP	0,00	303.556.600,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-mVzJC0FHQgxEkFy	Terima dari SPM PTUP	0,00	0,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG-mRiPHDvG60ZpA81	Terima dari SPM PTUP	0,00	0,00	0,00
Jumlah			927.412.600,00	927.412.600,00	0,00



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH (692028)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	383BE6847TBSUJER 923468102413	411211	IDR	2,081,081	ADA
2	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	AC76C6846R1S6LBK 923472102414	411211	IDR	247,748	ADA
3	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	EE0574F98UPGTJOL 923475102415	411211	IDR	356,757	ADA
4	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	6BC441Q0OPREGUQ G 923478102416	411211	IDR	445,946	ADA
5	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	BE8D25BMOUJPTCB O 923480102416	411211	IDR	267,568	ADA
6	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	A51790TJA1HRSDK3 926104102303	411211	IDR	384,405	ADA
7	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	90DA54F99B1L9HKG 926112102304	411211	IDR	1,485,550	ADA
8	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	E25503IROETTPND0 926115102305	411211	IDR	367,658	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	A7E402ME9E4QHJAM 926121102305	411211	IDR	219,158	ADA
10	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	B8F7F5BMNIGOKKQ4 926125102306	411211	IDR	51,036	ADA
11	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	8453B74HMN1UD3VJ 926137102309	411211	IDR	445,946	ADA
12	051	119919	08-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	CD68674HNJC9C277 926140102309	411211	IDR	495,495	ADA
13	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	FA7DF5BMMR9SIVB M 912178102841	411211	IDR	1,783,784	ADA
14	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	961FC0TJAE7DDB3K 912184102843	411211	IDR	7,177,122	ADA
15	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	AF6644F99LFT5SUU 912187102844	411211	IDR	4,954,955	ADA
16	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	DDFAF1Q0OTAGKEC I 912191102846	411211	IDR	733,333	ADA
17	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	439F71Q0OBIGHUJM 912193102847	411211	IDR	247,748	ADA
18	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	F4B702ME8NMPCVIM 912195102848	411211	IDR	386,486	ADA
19	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	D620868470GFEBTU 912197102848	411211	IDR	631,261	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	E1E7B684716FFETI 912199102849	411211	IDR	4,927,703	ADA
21	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	34A0F74HO05OR899 912200102849	411211	IDR	4,010,339	ADA
22	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	A2BF41Q0OAARRNS L 912725102928	411211	IDR	1,465,775	ADA
23	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	2863F015PA62K0KU 912732102929	411211	IDR	2,458,252	ADA
24	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	A07001Q0OM3QJVHR 912738102931	411211	IDR	1,831,351	ADA
25	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	CCCD21Q0Q5S37629 912750102934	411211	IDR	436,036	ADA
26	051	119919	24-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	CC1E96849BLACVMK 912757102937	411211	IDR	510,360	ADA
27	051	119919	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	D204C68496P3NBU1 914850100612	411211	IDR	1,010,811	ADA
28	051	119919	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	0E48D68497EE2PF1 914859100614	411211	IDR	564,865	ADA
29	051	119919	31-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	455090TJ9P90S5EN 905903084141	411211	IDR	1,016,800	ADA
30	051	119919	31-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	E55F674HNSJGG6S2 905906084142	411211	IDR	262,700	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
31					3C81D5BMMUA8I17N 905901084141	411121		100,000	N/A
32					D7E7E1Q0PU6ILNMK 905902084141	411122		138,700	N/A
33					DB0D01Q0P1MB7TVS 905904084141	411122		35,900	N/A
34					3B5433IRNA7DVJ44 905908084143	411124		23,000	N/A
35					183C70TJABK45JF9 912175102840	411122		124,464	N/A
36					BB2E31Q0P63RVBD M 912176102841	411122		60,743	N/A
37					C04320TJ9HJ0CPIP 912177102841	411124		324,324	N/A
38					C4BDC2ME8CUV6T5 A 912180102841	411122		229,350	N/A
39					501090TJ87FIMP79 912181102842	411122		47,297	N/A
40					B77A46846P1KU4SU 912182102843	411124		1,304,919	N/A
41					213F774HO5R0E90R 912186102844	411124		900,901	N/A

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
42					80E713IROFMARA7B 912189102845	411122		100,000	N/A
43					570324F97KHMN5J8 912192102847	411122		33,784	N/A
44					ABC5B0TJA2F15C6M 912194102847	411124		70,270	N/A
45					008751Q0OP7UOVDO 912196102848	411122		86,081	N/A
46					78FCE6847FI4J5AT 912198102849	411122		671,959	N/A
47					58C9774HN981QGES 912201102850	411124		729,225	N/A
48					593614F999LPJ41D 912715102926	411121		15,448,950	N/A
49					378DB2ME92G2E8DP 912720102927	411121		2,749,650	N/A
50					2E155015OM4S2F1G 912722102927	411124		266,505	N/A
51					C5BAA2ME9J291RK2 912728102928	411122		335,216	N/A
52					BA095015OIVFHS2U 912736102930	411122		249,730	N/A

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
53					6397F3IRO7D8FVDJ 912741102931	411211		44,595	N/A
54					1538B3IROK4RUF0C 912746102932	411124		79,279	N/A
55					9CDB83IROJBV2RQD 912753102935	411124		92,793	N/A
56					330151Q0NLVQ0NF6 914849100611	411122		137,838	N/A
57					9BFA01Q0O9AETPF6 914851100612	411122		96,874	N/A
58					C3EF84F98EAKHAOC 914852100612	411122		79,096	N/A
59					7AFAB4F97JEQBON9 914853100613	411122		50,920	N/A
60					BA71C3IROCQUQ6C G 914854100613	411122		41,563	N/A
61					8BB352MEA39II92O 914855100613	411122		29,759	N/A
62					2BFC174HP2UQI60G 914856100614	411122		164,243	N/A
63					404F45BMMVGKOMK G 914858100614	411124		102,703	N/A

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
64					227E93IRP7ACU1V0 923464102413	411122		56,620	N/A
65					1CCA9015P1RHIKS3 923465102413	411122		283,784	N/A
66					3041F3IROEKSAE42 923470102414	411122		40,541	N/A
67					2D54874HP6V15E9F 923471102414	411124		45,045	N/A
68					F2A363IRPR52DDI5 923473102415	411124		64,856	N/A
69					C5FFC5BMN80JJ42H 923477102415	411124		81,081	N/A
70					F011D6847LV1J713 923479102416	411124		48,649	N/A
71					66E0374HOI14IVEL 923481102417	411122		33,784	N/A
72					E90C66847HDLEOMR 923482102417	411124		36,036	N/A
73					F3E752ME8JAF61HL 923493102417	411122		52,419	N/A
74					E9562015QFLVMKL3 926106102303	411122		40,541	N/A

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
75					214336849F6BBFAA 926110102303	411124		270,100	N/A
76					D062F4F97L2KPM9C 926113102304	411124		66,847	N/A
77					87BC42ME8I5J10KM 926119102305	411122		29,885	N/A
78					052B04F97362VRKK 926123102306	411124		92,793	N/A
79					7BE165BMO22FC91N 926126102306	411122		82,973	N/A
80					8260D6847MP059IL 926127102306	411122		92,861	N/A
81					509344F99MJHP65V 926130102307	411122		33,981	N/A
82					472725BMN01BDSMH 926131102307	411122		84,513	N/A
83					E1C674F98HFMP6PS 926132102308	411122		80,539	N/A
84					7BD9C2ME94R9HV3L 926134102308	411122		83,149	N/A
85					9409D1Q0PTKCMET0 926135102308	411124		81,081	N/A

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
86					84AF274HOK05U5A1 926139102309	411124		90,090	N/A
TOTAL								68,080,828	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicitak oleh 198602172009011004 pada 05-01-2026 09:12:49 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNB KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH (692028)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	051	692028	10-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	2D3832CPTEGVAQQ B 903706080509	815111	IDR	454,601	ADA
2	051	692028	29-Des-25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S 1091031211270935	45A07522CUDPSUOC 914848100611	815511	IDR	22,572,313	ADA
TOTAL								23,026,914	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198602172009011004 pada 05-01-2026 09:12:49 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH (692028)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198602172009011004 pada 05-01-2026 09:12:49 WIB.

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ : 2025-12

Sequence LPJ : 00002/LPJ/69202800/12/2025

Kode Satker : 692028

Nama Satker : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

Tanggal Kirim : 05/01/2026 15:03

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Palu (051) dengan timestamp 05/01/2026 16:18 WITA.

Petugas Validator LPJ :

Staf : DESI NUR OKTAVIA pada 05/01/2026 15:46.

Kasi : HENDRA ZANUAR pada 05/01/2026 16:18.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 5/1/2026

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN & NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	E9562015QFLVMKL3 926106102303	411618	IDR	40.541	ADA
2	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	E90C66847HDLEOMR 923482102417	411618	IDR	36.036	ADA
3	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	227E93IRP7ACU1V0 923464102413	411618	IDR	56.620	ADA
4	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	472725BMN01BDSMH 926131102307	411618	IDR	84.513	ADA
5	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	F3E752ME8JAF61HL 923493102417	411618	IDR	52.419	ADA
6	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	AC76C6846R1S6LBK 923472102414	411211	IDR	247.748	ADA
7	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	3041F3IROEKSAE42 923470102414	411618	IDR	40.541	ADA
8	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	9409D1Q0PTKCMET0 926135102308	411618	IDR	81.081	ADA
9	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	87BC42ME8I5J10KM 926119102305	411618	IDR	29.885	ADA
10	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	F011D6847LV1J713 923479102416	411618	IDR	48.649	ADA
11	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	66E0374HOI14IVEL 923481102417	411618	IDR	33.784	ADA
12	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	8260D6847MP059IL 926127102306	411618	IDR	92.861	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN & NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
13	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	A51790TJA1HRSDK3 926104102303	411211	IDR	384.405	ADA
14	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	B8F7F5BMNIGOKKQ4 926125102306	411211	IDR	51.036	ADA
15	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	E1C674F98HFMP6PS 926132102308	411618	IDR	80.539	ADA
16	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	84AF274HOK05U5A1 926139102309	411618	IDR	90.090	ADA
17	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	F2A363IRPR52DDI5 923473102415	411618	IDR	64.856	ADA
18	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	2D54874HP6V15E9F 923471102414	411618	IDR	45.045	ADA
19	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	8453B74HMN1UD3VJ 926137102309	411211	IDR	445.946	ADA
20	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	D062F4F97L2KPM9C 926113102304	411618	IDR	66.847	ADA
21	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	6BC441Q0OPREGUQG 923478102416	411211	IDR	445.946	ADA
22	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	EE0574F98UPGTJ0L 923475102415	411211	IDR	356.757	ADA
23	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	CD68674HNJC9C277 926140102309	411211	IDR	495.495	ADA
24	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	A7E402ME9E4QHJAM 926121102305	411211	IDR	219.158	ADA
25	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	7BD9C2ME94R9HV3L 926134102308	411618	IDR	83.149	ADA
26	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	509344F99MJHP65V 926130102307	411618	IDR	33.981	ADA
27	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	052B04F97362VRRK 926123102306	411618	IDR	92.793	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN & NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
28	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	1CCA9015P1RHIKS3 923465102413	411618	IDR	283.784	ADA
29	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	BE8D25BMOUJPTCBO 923480102416	411211	IDR	267.568	ADA
30	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	E25503IROETTPND0 926115102305	411211	IDR	367.658	ADA
31	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	C5FFC5BMN80JJ24H 923477102415	411618	IDR	81.081	ADA
32	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	383BE6847TBSUJER 923468102413	411211	IDR	2.081.081	ADA
33	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	214336849F6BBFAA 926110102303	411618	IDR	270.100	ADA
34	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	7BE165BMO22FC91N 926126102306	411618	IDR	82.973	ADA
35	051	119919	08-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	90DA54F99B1L9HKG 926112102304	411211	IDR	1.485.550	ADA
36	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	9CDB83IROJBV2RQD 912753102935	411618	IDR	92.793	ADA
37	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	B77A46846P1KU4SU 912182102843	411618	IDR	1.304.919	ADA
38	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	1538B3IROK4RUF0C 912746102932	411618	IDR	79.279	ADA
39	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	BA095015OIVFHS2U 912736102930	411618	IDR	249.730	ADA
40	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	C5BAA2ME9J291RK2 912728102928	411618	IDR	335.216	ADA
41	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	CCCD21Q0Q5S37629 912750102934	411211	IDR	436.036	ADA
42	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	DDFAF1Q00TAGKECI 912191102846	411211	IDR	733.333	ADA
43	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	2863F015PA62K0KU	411211	IDR	2.458.252	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN & NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
				TENGAH S	912732102929				
44	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	F4B702ME8NMPCVIM 912195102848	411211	IDR	386.486	ADA
45	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	C4BDC2ME8CUV6T5A 912180102841	411618	IDR	229.350	ADA
46	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	CC1E96849BLACVMK 912757102937	411211	IDR	510.360	ADA
47	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	378DB2ME92G2E8DP 912720102927	411618	IDR	2.749.650	ADA
48	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	570324F97KHMN5J8 912192102847	411618	IDR	33.784	ADA
49	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	AF6644F99LFT5SUU 912187102844	411211	IDR	4.954.955	ADA
50	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	2E155015OM4S2F1G 912722102927	411618	IDR	266.505	ADA
51	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	BB2E31Q0P63RVBDM 912176102841	411618	IDR	60.743	ADA
52	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	78FCE6847FI4J5AT 912198102849	411618	IDR	671.959	ADA
53	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	D620868470GFEBTU 912197102848	411211	IDR	631.261	ADA
54	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	961FC0TJAE7DDB3K 912184102843	411211	IDR	7.177.122	ADA
55	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	A07001Q0OM3QJVHR 912738102931	411211	IDR	1.831.351	ADA
56	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	6397F3IRO7D8FVDJ 912741102931	411618	IDR	44.595	ADA
57	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	213F774HO5R0E90R 912186102844	411618	IDR	900.901	ADA
58	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	A2BF41Q0OAAARRNSL 912725102928	411211	IDR	1.465.775	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN & NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
59	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	C04320TJ9HJ0CPIP 912177102841	411618	IDR	324.324	ADA
60	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	80E713IROFMARA7B 912189102845	411618	IDR	100.000	ADA
61	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	008751Q0OP7UOVD0 912196102848	411618	IDR	86.081	ADA
62	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	E1E7B684716FFETI 912199102849	411211	IDR	4.927.703	ADA
63	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	593614F999LPJ41D 912715102926	411618	IDR	15.448.950	ADA
64	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	501090TJ87FIMP79 912181102842	411618	IDR	47.297	ADA
65	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	183C70TJABK45JF9 912175102840	411618	IDR	124.464	ADA
66	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	ABC5B0TJA2F15C6M 912194102847	411618	IDR	70.270	ADA
67	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	34A0F74HO05OR899 912200102849	411211	IDR	4.010.339	ADA
68	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	FA7DF5BMMR9SIVBM 912178102841	411211	IDR	1.783.784	ADA
69	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	58C9774HN981QGES 912201102850	411618	IDR	729.225	ADA
70	051	119919	24-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	439F71Q0OBIGHUJM 912193102847	411211	IDR	247.748	ADA
71	051	119919	29-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	330151Q0NLVQ0NF6 914849100611	411618	IDR	137.838	ADA
72	051	119919	29-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	404F45BMMVKGKOMKG 914858100614	411618	IDR	102.703	ADA
73	051	119919	29-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	D204C68496P3NBU1 914850100612	411211	IDR	1.010.811	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN & NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
74	051	119919	29-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	8BB352MEA39II92O 914855100613	411618	IDR	29.759	ADA
75	051	119919	29-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	2BFC174HP2UQI60G 914856100614	411618	IDR	164.243	ADA
76	051	119919	29-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	7AFAB4F97JEQBON9 914853100613	411618	IDR	50.920	ADA
77	051	119919	29-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	C3EF84F98EAKHAOC 914852100612	411618	IDR	79.096	ADA
78	051	119919	29-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	0E48D68497EE2PF1 914859100614	411211	IDR	564.865	ADA
79	051	119919	29-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	BA71C3IROCQUQ6CG 914854100613	411618	IDR	41.563	ADA
80	051	119919	29-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	9BFA01Q009AETPF6 914851100612	411618	IDR	96.874	ADA
81	051	119919	31-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	DB0D01Q0P1MB7TVS 905904084141	411618	IDR	35.900	ADA
82	051	119919	31-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	3B5433IRNA7DVJ44 905908084143	411618	IDR	23.000	ADA
83	051	119919	31-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	455090TJ9P90S5EN 905903084141	411211	IDR	1.016.800	ADA
84	051	119919	31-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	3C81D5BMMUA8I17N 905901084141	411618	IDR	100.000	ADA
85	051	119919	31-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	D7E7E1Q0PU6ILNMK 905902084141	411618	IDR	138.700	ADA
86	051	119919	31-12-2025	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH S	E55F674HNSJGG6S2 905906084142	411211	IDR	262.700	ADA
								TOTAL :	68.080.828



Ditandatangani secara elektronik
Sulistya Putri Suharwati
NIP. 199902072021012001



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN HUKUM (135)

SEKRETARIAT JENDERAL (01)

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH (692028)

Rekening Induk : RKK SETJEN KEMENTERIAN HUKUM OPS (034101xxxxx301)

Virtual Account : 654926920281000 | BPG 051 KANWIL KEMENKUM SULTENG

Periode : 01-12-2025 s/d 31-12-2025

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-05	10:55:47	47787152	From 032901003295305 to 654926920281000 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni pada Kanwil Kementerian Hukum Sulteng Tahun 2025 Se 259991311311343000001	0,00	0,00	927.412.600,00	927.412.600,00	SPAN	
2025-12-08	11:34:36	47926344	REGULAR_65492_6920281000	927.412.600,00	250.000.000,00	0,00	677.412.600,00	TELLER_CARD	
2025-12-09	13:47:52	47993501	REGULAR_65492_6920281000	677.412.600,00	100.000.000,00	0,00	577.412.600,00	TELLER_CARD	
2025-12-10	08:51:19	48031386	REGULAR_65492_6920281000	577.412.600,00	273.856.000,00	0,00	303.556.600,00	TELLER_CARD	
2025-12-15	12:50:40	48265467	REGULAR_65492_6920281000	303.556.600,00	303.556.600,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		927.412.600,00	927.412.600,00			
			Saldo Akhir				0,00		